

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap perusahaan pasti menginginkan agar usahanya dapat terus berkembang dan sukses. Persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan berupaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Perusahaan harus memiliki manajemen yang baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Tujuan dari perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham dan mencapai keuntungan yang optimal. Perusahaan membutuhkan modal, modal merupakan salah satu factor yang dibutuhkan dalam kelangsungan serta menjamin operasi perusahaan selain sumber daya, material maupun faktor pendukung lainnya. Suatu keputusan yang diambil manajer dalam suatu pembelanjaan harus dipertimbangkan secara teliti, sifat dan biaya dari sumber dana yang akan dipilih karena masing-masing sumber dana tersebut memiliki konsekuensi financial yang berbeda. Karena modal dibutuhkan pada setiap perusahaan harus menentukan berapa besarnya modal yang dibutuhkan untuk memenuhi atau membiayai usahanya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penentuan modal sendiri dan hutang jangka panjang harus dilakukan dengan cermat agar tujuan perusahaan tercapai ( Tuti dan Dwijayanti, 2014).

Pengertian UMKM adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana

diatur oleh undang-undang. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang (Tambunan 2013:2).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biasa disebut UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa, karena dianggap telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan ekonomi serta memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kekuatan utama ekonomi Indonesia bukan hanya terletak pada investasi asing, justru terletak pada sektor UMKM. Mengingat peranannya dalam pembangunan, UMKM harus terus dikembangkan agar terciptanya pemerataan serta terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan iklim usaha (Ridwan, Hartutiningsih, dan Hatuwe;2017).

Sebagian UMKM tidak melakukan pencatatan dan membuat laporan keuangan atas kegiatan usahanya secara rutin dan benar. Hal ini menyebabkan pelaku UMKM tidak dapat mengukur, dan menilai kinerja keuangannya dengan tepat dan benar, sehingga beberapa keputusan keuangan tidak dilakukan berdasarkan informasi yang akurat. Kegiatan usaha yang tidak terukur,

pertumbuhan usaha, laba, pendapatan, aset, modal dan kelayakan usaha yang menjadi informasi penting dalam perencanaan, evaluasi, dan penyusunan strategi usaha tidak tersedia secara lengkap, transparan, dan rutin membuat kegiatan UMKM tidak dapat berkembang. Sebagian dari pelaku UMKM tidak menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, dengan alasan bahwa kegiatan usaha tersebut hanya dipertanggungjawabkan untuk diri pribadi, karena usaha milik perorangan.

Selain itu juga tidak adanya sumber daya manusia atau karyawan yang memahami dan memiliki pengetahuan dalam penyusunan laporan keuangan yang benar. Beberapa pelaku UMKM telah melakukan penyusunan laporan keuangan secara rutin, dan benar sesuai standar akuntansi yang berlaku karena berbagai pertimbangan, antara lain adalah kegiatan usaha telah lama dijalankan dan juga aset perusahaan, pelanggan, wilayah pemasaran, perputaran aset yang sudah cukup besar, dan juga telah memiliki karyawan atau SDM yang memiliki pengetahuan tata cara penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK. Sesuai ketentuannya bahwa untuk usaha kecil dalam menyusun laporan keuangan harus menggunakan SAK-EMKM. SAK-EMKM merupakan bentuk dukungan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2019) dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan entitas. SAK-EMKM merupakan standar akuntansi yang sudah disederhanakan dalam mengatur transaksi yang umum dilakukan UMKM dan dasar pengukurannya menggunakan biaya historis (David, 2018) SAK-EMKM baru mulai berlaku sejak 1 Januari 2018.

Hadirnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM) yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 24 Oktober 2016 merupakan bukti nyata dukungan terhadap UMKM di Indonesia. SAK EMKM ini berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai Per 1 Januari 2018. Sesuai dengan ruang lingkup SAK EMKM maka standard ini dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Miko Kecil dan Menengah. Sebelumnya DSAK IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada tahun 2009 yang dikhususkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dimaksudkan adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan yang tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal seperti UMKM. Contoh pengguna eksternal yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Namun seiring dengan perkembangannya dibutuhkan standar yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP yang dirasa masih sulit untuk diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Siswanti & Suryati (2019), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan adalah ukuran perusahaan dan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa, koefisien nilai ukuran perusahaan dan Kompetensi SDM memiliki huubungan positif searah dengan penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil ini

diperkuat juga dengan hasil uji hipotesis dimana secara persial dan simultan kedua variable tersebut berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Kemudian hasil koefisien menunjukkan kemampuan varian variable ukuran perusahaan dan kompetensi SDM menjelaskan varian dari penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan sebesar 67,5%.

Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendefinisikan usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki orang perorangan (orang pribadi) atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan yang dilakukan oleh orang perorangan (orang pribadi) atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan (orang pribadi) atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini. Jenis UMKM yang ada di Indonesia terdiri dari : (1) pertanian dan/atau terkait dengan pertanian (agribisnis); (2) pertambangan rakyat dan penggalan; (3) industri kecil dan kerajinan rumah tangga; (4) listrik non PLN; (5) konstruksi; (6) perdagangan besar, eceran, rumah

makan, dan jasa komunikasi; (7) angkutan dan komunikasi; (8) lembaga keuangan; (9) real estate dan persewaan.

Sesuai dengan ruang lingkup SAK EMKM maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Sebelumnya DSAK IAI telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada tahun 2009 yang dikhususkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang dimaksudkan adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan yang tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal seperti UMKM. Contoh pengguna eksternal yaitu pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Namun seiring dengan perkembangannya dibutuhkan standar yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP yang dirasa masih sulit untuk diterapkan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penerapan pencatatan laporan keuangan sangat diperlukan karena UMKM yang menghasilkan laba yang besar, tidak menjadi jaminan mendapatkan pinjaman dari Bank dikarenakan sulitnya investor yang bersedia untuk meminjamkan atau menanamkan modalnya pada UMKM. Alasan yang mendasar adalah UMKM tersebut tidak dapat menunjukkan bukti operasional dan keuntungan perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan selain untuk menarik investor, memang merupakan tahap awal dari penerapan akuntansi yang akan menghasilkan informasi dan mempunyai peranan

penting, baik untuk penyusunan perencanaan, `pengendalian, maupun untuk pengambilan keputusan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu, Suastini, Dewi dan Yasa (2018), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia dan ukuran usaha terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng.. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM di kecamatan Buleleng. (2) ukuran usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman UMKM pada UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM di Kecamatan Buleleng.

Siswanti & Suryati (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis faktor – faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah di wilayah Jakarta Timur. Berdasarkan hasil persamaan regresi menunjukkan bahwa, koefisien nilai ukuran perusahaan dan Kompetensi SDM memiliki hubungan positif searah dengan penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil ini diperkuat juga dengan hasil uji hipotesis dimana secara parsial dan simultan kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Kemudian hasil koefisien menunjukkan kemampuan varian variabel ukuran perusahaan dan kompetensi SDM menjelaskan varian dari penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan sebesar 67,5%.

Kelurahan Oesapa memiliki Luas (km<sup>2</sup>) 4,37 km<sup>2</sup> terdiri dari: 2 Km<sup>2</sup> daratan dan 2,37 Km<sup>2</sup> perbukitan dengan batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Lasiana, sebelah barat berbatasan kelurahan Oesapa Barat, sebelah Utara berbatasan dengan laut ( teluk Kupang), dan sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Oesapa Selatan. Jumlah penduduk di Kelurahan Oesapa berjumlah 30,767 dengan laki-laki berjumlah 14,700 jiwa dan perempuan berjumlah 16,067 jiwa. Dengan jumlah UMKM sebanyak 232 pelaku usaha di kelurahan Oesapa, yang terdiri dari usaha foto copy, usaha kos – kosan, usaha kios dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh kualitas sumber daya manusia dan ukuran usaha terhadap pemahaman pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah ( SAK EMKM).**

### **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi masalah penelitian ini adalah Pengaruh Kualitas sumber daya manusia dan ukuran usaha terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM).

### **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah ( SAK EMKM) ?
2. Bagaimana pengaruh ukuran usaha terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) ?

#### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM).
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran usaha terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM).

##### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau bahan referensi perkembangan ilmu lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan untuk memecahkan masalah yang diangkat oleh peneliti terkait dengan judul ini pengaruh kualitas sumber daya manusia dan ukuran usaha terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM).
- b. Bagi pelaku usaha UMKM, Sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kinerja para pelaku UMKM.
- c. Bagi Pembaca, hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia dan ukuran usaha terhadap pemahaman pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM).